

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK NJOTO

A. Politik Demokrasi

Pada 28 Oktober 1956 Presiden Soekarno berpidato di depan para pemuda untuk peringatan hari sumpah pemuda “Krisis nasional yang melanda negara saat itu disebabkan oleh adanya partai-partai politik yang muncul oleh Maklumat Wapres Nomer x Tahun 1945, sehingga menjadi impianku untuk membubarkan semua partai politik...”¹

Pada 2 Juni 1964, *Harian Merdeka* mengeluarkan Tajuk rencana dalam dukungannya untuk membubarkan partai-partai atau menyatukan partai-partai yang ada untuk dijadikan menjadi satu partai dan partai yang besar menjadi penggerak utamanya. *Harian Rakyat* tertanggal 4 Juni 1964 yang berjudul "Gotong Royong ala 'BI' dan 'Persatuan' ala 'Merdeka'" mengomentari tajuk rencana *Berita Indonesia* itu. Editorial *Harian Rakyat*,

"Yang terpokok dari tajuk rencana „BI” kemarin adalah sbb.; „Teori Aidit yang mengatakan bahwa membentuk 'satu partai' sekarang berarti memasukkan rakyat revolusioner dalam satu kandang dengan kaum komprador dan kapitalis birokrat... adalah suatu teori yang bertentangan dengan dasar kegotongroyongan masyarakat Indonesia...”²

Editorial *Harian Rakyat* yang terbit 4 Juni 1964 menyinggung tentang editorial *Harian Merdeka* yang berpendapat sama dengan *Berita Indonesia*. Gagasannya *Harian Merdeka*,

¹ M. Dzulfikridi. *Mohammad Natsir dalam sejarah politik Indonesia: peran dan jasa Mohammad*. Bandung: Mizan Publika, 2010, hlm. 123.

² Njoto. "Gotong Royong ala 'BI' dan 'Persatuan' ala 'Merdeka'", *Harian Rakyat*, 4 Juni 1964, Editorial, dalam *Harian Rakyat, Polemik Merdeka-Harian Rakyat*, Jakarta, tt, hlm. 6.

"bahwa kalau tinggal hanya „satu partai” maka persatuan akan „lebih kokoh”, seakan-akan yang dikumpulkan itu benda-benda mati dan bukan kelas2, golongan2, manusia2. Se-akan2 lenyap partai2 akan berarti lenyap problem2 sehingga kita bisa lenggangkangkung kemasyarakat adil dan makmur....”³

Baru beberapa hari setelah gagasan pembentukan satu partai dibahas, ada dari mereka yang mendukung pembubaran satu partai alasannya terlalu dan sangat tidak beralasan, “Dia katakan di negeri-negeri Sosialis hanya ada satu partai dari mana fakta ini di pungut? Benarkah Panndji Suroso tahu berapa partai di RRC, berapa di Polandia, beberapa di RDD”⁴ Berita Indonesia dalam dukungannya tentang pembentukan satu partai mengalami kemunduran dan tidak seperti yang diucapkan pada gagasannya yang pertama yang mendukung penuh. Namun berita Indonesia pada kelanjutannya meyakini tentang pendirian satu partai masih untuk bisa dibahas dan untuk selanjutnya, dicarikan jalan keluarnya.

Beda halnya dengan harian Merdeka yang tetap mendukung penuh dengan rencana pembentukan satu partai dengan menjelaskan adanya kejadian-kejadian yang terjadi di kota-kota dan maraknya aksi yang tidak terpuji yang terjadi dalam partai dan di dalam front Nasional pada saat mereka melakukan kegiatannya membuat harian Mkrdeka tetap mendukung program pembubaran satu partai menjadi satu partai. Akan tetapi alasan yang dijelaskan oleh harian Merdeka tersebut ditolak oleh Njoto, “Kalau ada KDH korup, tidak dihitung bikin keributan, tapi kalaurakyat menuntut ritullingnya,, ini keributan”, lalu seperti radja-radja

³ Njoto, 1964, *Ibid.*,

⁴ Njoto, 1964, *Ibid.*, hlm. 9.

„Merdeka” menuding: itu „liberal”, jadi apa maunya? Supaya Rakyat rusting2 saja, supaya taka da sosial control....”⁵

Dengan berbagai alasannya harian Merdeka dan berita Indonesia mendukung pembubaran partai-partai. harian Merdeka dengan alasannya menjelaskannya, “kita hanya ingin mengigatkan kaum yang di sebut Ali.. Partai phobia”⁶ Berita Indonesia menuding Harian Rakyat yang dijelaskan pada 5 juni 1964 yang berjudul „Nuchther” Nja „BI” „Merdeka” mereka mengira kalau harian Rakyat telah memalsukan kejadian yang telah terjadi dimasyarakat. Dengan tudingan tersebut Njoto menolak “Apakah bahwa revolusi kita mempunyai dua tahap itu bukan fakta? Apakah tak bisa didamaikannya tuan tanah dengan kaum tani, kaum kapitalis birokrat dengan kaum buruh. Dsb bukan fakta”⁷Njoto mengatakan bahwasannya kalau Harian merdeka hanya berbicara terus menerus dengan berbagai alsannya, “Merasa punya cukup alasan untuk membantah bahwa dirinya „membelokan perhatian masyarakat dari sasaran pokok revolusi pada waktu ini, yaitu pengganyangan terhadap 'Malaysia”⁸

Dengan bujukan untuk berfikir dengan kepala dingin. Dengan meyelidiki sikap lembaga (tajuk rencananya harian Merdeka) yang terkotak-kotak dan intinya hanya untuk pemimpin tertinggi. Hal inilah yang dimaui oleh harian Rakyat. Ini bukanlah hal yang perdana bagi harian Rakyat diskusi dengan harian Merdeka. Media masa harian Merdeka memperlihatkan kecondongannya ke arah anti rakyat.

⁵ Njoto.1964. *Ibid*.hlm.,10.

⁶ Njoto. 1964. *Ibid*.hlm.13.

⁷ Njoto.1964. *Ibid*.hlm.19

⁸ Njoto.1964. *Ibid*,

Media masa ini pula yang sangat ketakutan terhadap komunisme. Maka bisa di bilang sama, dengan pers imprealis yang pekerjaannya. memfitnah golongan kanan untuk membenci kaum komunis. Dengan memaki-maki golongan nasionalis dan mencoba membuat golongan nasionalis dan golongan komunisme untuk saling bermusuhan.

B. Antara Pancasila dan Islam

Dalam pendiriannya Moh. Natsir dalam sidang pleno konstituante 12 November 1957 yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan pertentangan banyak pihak alasan Natsir untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara dan bukan Pancasila. Sebagai alasannya Natsir,

“Panca-sila, tidak di percayai sebagai agama. Kalaupun ada terumus didalamnya „Sila Ketuhanan“, sumbernya, backgroundnya adalah seculair, la-diniyah, tanpa agama. Ia bukan bersumber kepada salah satu wahyu ilahi. Ia adalah dan ternyata, hasil penggalian. Pengalian dari masyarakat. Ia bukan pengakuan dan penyaksian akan kedaulatan tuhan dengan segala konsekwein atas yang mengakui dengan berupa ketaan kepada Hukum ilahi yang positif. Ia hanyalah „rasa adanya Tuhan “ tanpa wahyu, tanpa konsekweni....”⁹

Dengan menolak gagasan Pancasila untuk digunakan sebagai dasar negara. Natsir juga tidak meyetujuinya dengan alasannya “tidak berakar” didalam masyarakat dan didalam kalbu Rakyat”¹⁰ Akan tetapi Njoto membantahnya dengan meyakinkan adanya setengah dari penduduk Indonesia yang memilih partai untuk dijadikan anggota Konstituante pada waktu pemilihan 1955 merupakan partai yang

⁹ Mohammad Natsir. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi, 1957, hlm. 24-25.

¹⁰ Njoto. *PKI dan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1958, hlm.30.

mendukung pancasila.¹¹ Dengan berbagai penjelasannya Natsir dengan terang-terangan tetap menolak Pancasila sebagai dasar negara,

hanya pertemuan kata2”, “perumusan serangkain ide yang ada dalam Pancasila” itu “dirasakan hampa, tak dapat berkata apa2 kepada jiwa” umat islam, ”ia tidak mendapat akar samasekali dalam kalbu rakyat”, ”Pancasila itu adalah suatu abstraksi, suatu 'pure concept' yang dalam kenyataan tidak bisa berdiri sendiri”¹²

Akan tetapi menjelang pemilu 1955 pada tahun 1952 dan 1954 yang dikatakan oleh Amad Bastari kalau Natsir mendukung Pancasila “Malahan menganggap Pancasila itu sebagai "dasar spiritual, moral dan etik dari bangsa dan negara kita"¹³ Ketika PKI di tayakan soal pahamnya yang berdasarkan Komunisme dan tentang PKI mau menerima Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. dimana dalam hal ini yang mempertanyakan merupakan dari anggota Masyumi dan oleh Njoto pun dijelaskan tentang kesediaan PKI mau menerima Pancasila sebagai dasar negara, “Kami menerima Pancasila didalam Undang-undang Dasar, sesuatu yang harus kami patuhi jika ia sudah disahkan”¹⁴

Njoto tidak tinggal diam begitu saja ketika PKI dipojokkan oleh anggota Masyumi. Dengan membalas pertanyaan dari Masyumi, Njoto memberikan fakta kalau Masyumi pernah menerima Pancasila, sebagai pada kampanye pemilu 1955, Njoto mempertanyakan kenapa Masyumi menolak Pancasila.¹⁵

¹¹.Njoto.1958.,*Ibid.*,

¹² Njoto.1958.*Ibid.*,31.

¹³ Njoto. 1958.*Ibid.*,33.

¹⁴ Njoto.1958. *Ibid.*,

¹⁵ *Njoto.1958.,Ibid.*,

Untuk menyikapi sikap Natsir, Njoto mempertanyakan tentang sikapnya seperti ini; mengapa Natsir, dalam sidang-sidang majelis memperlihatkan sikap "kejam" terhadap Pancasila dengan meyebutnya menolak Pancasila sebagai dasar negara. Njoto kemudian mengajukan pertanyaan, "Natsir yang mana yang harus diikuti? Apakah natsir pada tahun 1954 atau Natsir pada tahun 1957? atau tidak kedua-duanya"¹⁶ Di dalam sidang konstituante tersebut. Njoto yang membacakan di depan anggota sidang Konstituante mengatakan kalau Njoto sebagai dari pihak dari wakil PKI meyetujui adanya Pancasila sebagai dasar Negara hanya saja, Njoto mempertimbangkan tentang Ketuhanan yang maha esa tersebut. Kemauan Njoto ingin menganti. Dengan kebebasan beragama dengan alasannya,

Kemerdekaan beragama" lebih bijaksana dari pada sila "Ketuhan Yang Maha Esa" hal inipun sudah kami jelaskan. Barang siapa mengenal sejarah agama tentulah tahu bahwa politesme mendahului monoteisme dan bahwa sampai detik inipun monoteisme bukan satu-satunya aliran agama, bahwa disamping monoteisme selalu tetap ada tetap politeisme. Kita pergilah ke Tapanuli , ke Kalimantan Tengah, lebih-lebih ke Irian Barat, dan disana akan kita jumpai aliran politeisme dalam berbagai ragamnya.¹⁷

C. Sosialisme Hari Ini dan Hari Esok Bangsa-Bangsa

Pada HUT revolusi Oktober Rusia yang ke 45, Njoto mengucapkan selamat dan menyanjung pemimpin revolusi Rusia W.I. Lenin yang telah berhasil membawa Rusia pada sosialisme. Njoto senang apabila, Lenin pemimpin revolusi Oktober tersebut masih hidup dan bisa membaca tulisannya. Tentang Indonesia yang dulu dijajah oleh Kolonial Belanda sekarang sudah mendapatkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, walaupun saat terjadinya revolusi Agustus

¹⁶ Lihat. Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Yayasan Indonesia, 2001, hlm.67.

¹⁷ Njoto. 1958. op.cit.,hlm.27.

Indonesia tidak dipelopori oleh kaum buruh. Akan tetapi Indonesia telah berhasil mengusir dari penguasa, yaitu kapitalisme Belanda. Seperti urainnya Njoto tentang berdirinya negara-negara dibelahan dunia yang melawan kapitalisme dan mendirikan negara sosialis "Dinegeri-negeri kapitalis gerakan progresif dengan proletariat sebagai intinya maju dengan pesatnya. Kemajuan ini tidak hanya ditandai oleh demonstrasi-demonstrasi dan pemogokan-pemogokan"¹⁸ Untuk mencapai tujuannya menjadi negara sosialis yang di yakini oleh Njoto dan orang-orang PKI yang akan tercapai kemenangan terhadap Kapitalisme,

"Tidak meragukan lagi bahwa tujuan ini akan terlaksana, karena bintang kejora yang menerangi jalan perjuangan rakyat Indonesia ialah ajaran-ajaran Marx, Engels dan Lenin yang mahajaya, dan karena pengalaman dua rakyat besar Uni Soviet dan Tiongkok merupakan teladan yang memberi inspirasi kepada rakyat Indonesia...."¹⁹

PKI untuk pertama kali didirikan sudah menjadi partai pelopor yang progresif dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan kapitalis Belanda. Dengan berbagai pengalamannya yang sudah dirasakannya sekaligus untuk mencari jalan keluarnya dan semakin bertambahnya anggota PKI dan simpatisannya yang setiap hari semakin bertambah banyak dan berguna mendukung program-program yang belum terselesaikan.²⁰

¹⁸ Lihat. Njoto.dkk. *Sosialisme Hari Ini dan Hari Esok Bangsa-bangsa*. Jakarta: Pustaka Marxis, 1963, hlm.3.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Dari perjuangan rakyat di berbagai negara. Setiap masyarakatnya memperjuangkan negaranya tersebut dari kekuasaan kaum imprealis dan kapitalis dan kebanyakan menghendaki menjadi negara sosialisme setelah PD II berahir. Dengan cara di awali dari sistem Demokrasi. Lihat. D.N.Aidit. *Sosialisme Indonesia: dan Syarat-Syarat Pelaksanaannya*. Jakarta: Akademi Sosial Alirahman, 1962, hlm. 26.

Njoto menguraikan masalah-masalah di Indonesia yang sama sekali belum diselesaikan dan atas masalah-masalah tersebut. Njoto menuntut untuk segera diselesaikannya,

“Pertama penghapusan kapital monopoli asing yang masih menyisa, terutama dilapangan minyak, yaitu kapital imperialis Belanda, Inggris, Amerika, kedua, Land reform, karena sampai sekarang baru terlaksana Land reform yang konsekwen dibagian-bagian tertentu republik yang dilaksanakan dihari-hari revolusi 1945-1948 dan Land reform menurut "Undang-Undang Pokok Agraria,,....”²¹

Untuk mencapai berdirinya negara Sosialis. Kaum pekerja harus ikut berperan aktif, untuk ikut serta mewujudkannya dengan cara mendukung pemerintah yang belum melaksanakan Nasionalisme. setiap 1 Mei kaum pekerja memperingati hari buruh Internasional seperti juga yang terjadi di Indonesia. Kaum buruh mendukung penuh untuk segera dilakukannya nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan menuntut dikembalikannya UUD 45 untuk menggantikan UUDS.²² dan mengambil sikap tegas terhadap gerakan makar yang dilakukan oleh DI/TII dan PRRI-Semesta.²³

Pada peringatan Hari Buruh, Njoto berpidato di depan kaum buruh di Bandung yang menguraikan 4 perjuangan kaum buruh dalam prosesnya untuk mencapai perbaikan,"Kampiu 4 perjuangan" yaitu Kampiu kemerdekaan,

²¹ *Ibid.*, hlm.5.

²² Menuntut untuk dikembalikannya UUD45 dan menggantikan UUDS semata-mata untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan dan mempersatukan kesatuan yang mau disatukan. Yang terdiri dari kekuatan masa yang anti kolonialisme dan feodalisme. Lihat, Njoto, *Demokrasi Terpimpin Sangkur Bermatadua*. Harian Rakyat, 4 Mei 1959.

²³ Njoto, Kelas Buruh Kampiu Perjuangan. Harian Rakyat, 5 Mei 1959.

kampiu demokrasi, kampiu perbaikan nasib dan kampiu kemerdekaan"²⁴ Untuk mengusir imprealisme dari negara dibutuhkan sebuah tindakan yang sama-sama menyadari kalau imprealisme merupakan penjajahan yang akan mengebiri sebuah negara.

“Di Eropa Timur pada waktu itu, berkat perjuangan kaum partisan di negara-negara Eropa Timur, dan berkat bantuan aktif Tentara Merah Uni Soviet, sejumlah negara melepaskan diri dari ikatan imprealisme dan mendirikan negara-negara merdeka yang mereka namakan Demokrasi Rakyat. Tetapi di Asia, Indonesia termasuk negara yang paling pertama melemparkan belunggu imprealisme ke dalam lauatannya sejarah dan yang meneggakkan satu republik yang-seperti yang tercantum di dalam Mukadimah Undang-undang Dasar 1945 kita asasnya “mereka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dan yang berdasarkan pancasila sewaktu Vietnamnya Ho-chi Minh, Koreanya Kim II korannya Kim Vietnamnya, Kawan-kawan kita di Korea- Sung itupula. Saudara-saudara, kalau sekarang kita membina satu poros anti imprealisme, poros anti-imprealisme, yaitu poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang, jaganlah dikira bahwa poros ini bikinan-bikinan, tidak-poros ini adalah poros yang paling wajar, yang dibentuk oleh jalannya sejarah itu sendiri. Republik Indonesia sendiri mengalami gelombang pasang gelombang dan gelombang surut, gelombang naik-gelombang turun. Tetapi arus pokok daripada Republik Indonesia itu adalah arus pasang, arus naik, arus maju, arus ofensif, arus kemenangan ”²⁵

Apabila ada seseorang yang mengatakan kalau perjuangan tanpa adanya keikutsertaan satu orang saja maka orang tersebut merupakan orang yang apatis. Yang tidak peduli pada nasib bangsanya dikemudian hari. Maka dengan itu diminta keikutsetaanya siapa saja dikarenakan revolusi Indonesia sangatlah besar. Seperti juga dalam teorinya Karl Marxl, “Hukum dialektika yang akan membalikkan garis hidup imprealisme menjadi garis-mati dari pada imprealisme”²⁶

²⁴ Njoto. 1959., *Ibid.*,

²⁵ Presiden Soekarno, *Amanat Proklamasi Pidato Pada Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Inti Indayu Press. Yayasan Pendidikan Soekarno. 1986, hlm.168.

²⁶ Soekarno. *Ibid.*, hlm.172.

Untuk menghadapi serangan dari negara-negara imperialisme kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia karena mereka negara imperialisme tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan tipe negara yang sedang digagas oleh Soekarno dan pemimpin-pemimpin negara yang ingin mendirikan negara sosialis.²⁷ Dalam pandangannya Njoto untuk mengukur revolusi,

“Bagaimana mengukur suatu revolusi dengan ukuran-ukuran revolusi? Segala sesuatu hendaknya diamati: untuk kesejahteraan umum, ya atau tidak? Pro bono publica-inilah semboyan kita. Artinya pro bono publica untuk kesejahteraan umum! Sekalipun ada yang secara pribadi dirugikan, sekalipun ada yang laba perusahaan berkurang, tapi asal pro bono publik, maka ia harus diterima....”²⁸

Seperti pada 1957 Indonesia telah merebut modal Belanda dan pada 1963 Indonesia juga telah merebut modal Inggris, dan sekarang kita telah merebut modal Amerika Serikat, sebagai berikut; Mengambilalih modal Amerika Serikat. Sekarang modal itu berada dibawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Ini merupakan langkah penting bagi RI, yang dengan asas Berdikari sedang menegakkan perekonomian nasionalnya sendiri, yang bebas sama sekali dari Imperialisme maupun feodalisme.

Di dunia dewasa ini “sosialisme”. Benar-benar menjadi mode. Tidak ada sesuatu pemerintah, yang tidak mau dimusuhi rakyatnya, yang tidak menyatakan dirinya “sosialisme”....”²⁹ Indonesia tidak mau munafik dengan sosialismenya. Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa revolusinya masih dalam tahap nasionalis-demokratis, sekalipun sejumlah hasil penting telah dicapai dalam tahap ini. Nanti akan datangnya ketikanya, yang Indonesia akan membangun sosialisme, yaitu apabila modal imperialis sudah habis sama sekali dan permilikan tanah kaum tuan tanah sudah dibagi kembali kepada rakyat. Yang terang, anak kecil pun bisa

²⁷ Soekarno.1986, *Ibid.*, hlm.173.

²⁸ Soekarno.1986, *Ibid.*, hlm.174.

²⁹ Soekarno.1986, *Ibid.*, hlm.,182.

mengerti, yang terang ialah bahwa dengan modal imprealisme tidak mungkin kita membangun sosialisme....”³⁰

³⁰ Soekarno.,1986, *Ibid.*